



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS GERAKAN BELA-BELI KULON PROGO)

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS GERAKAN BELA-BELI KULON PROGO)

Rainma Afifah Rahmadanti¹ Kurnia Nur Fitriana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 16-03-23

Diperbaiki 07-04-23

Disetujui 12-04-23

Kata Kunci:

collaborative governance, pengembangan ekonomi kreatif, Gerakan Bela-Beli Kulon Progo

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan faktor pendukung serta penghambat *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui Gerakan Bela-Beli Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* mampu memberikan ruang untuk menginisiasi aktor-aktor yang terlibat untuk berproses positif dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo melalui Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Namun demikian terdapat dinamika kerentanan masalah berupa peran yang belum maksimal dari beberapa pihak koperasi dalam penerapan kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo di Program Toko Milik Rakyat (ToMiRa). Faktor pendukung dalam proses kolaborasi ini adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, kepentingan pemerintah, struktur sosial dan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sedangkan, faktor penghambat dalam proses kolaborasi ini adalah kemasakan produk lokal yang kurang mendukung, pemasaran produk bela-beli melalui website <https://belabeliku.id/home/about> yang belum optimal, rendahnya komitmen para pelaku UMKM dan Koperasi, dan juga kondisi mentalitas masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

collaborative governance, creative economy development, *Gerakan Bela-Beli Kulon Progo*

This study aims to explain the processes and factors supporting and inhibiting collaborative governance in the development of the creative economy through the Gerakan Bela-Beli Kulon Progo in Kulon Progo Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that collaborative governance is able to provide space for initiating the actors involved to carry out positive processes in the development of the creative economy in Kulon Progo Regency through the Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. However, there are dynamics of vulnerability to the problem in the form of the role that has not been maximized by several cooperatives in implementing the Kulon Progo Purchase Movement

DOI: <https://doi.org/zzzz/i.vxxx.xxx>

policy in the People's Owned Shop (ToMiRa) Program. Supporting factors in this collaboration process are the level of public awareness to participate, government interests, social structure and abundant natural and human resources. Meanwhile, the inhibiting factors in this collaboration process are the packaging of local products that are not supportive, the marketing of buy-and-sell products through the website <https://belabeliku.id/home/about> which is not yet optimal, the low commitment of MSME and Cooperative actors, and also the state of mentality public.

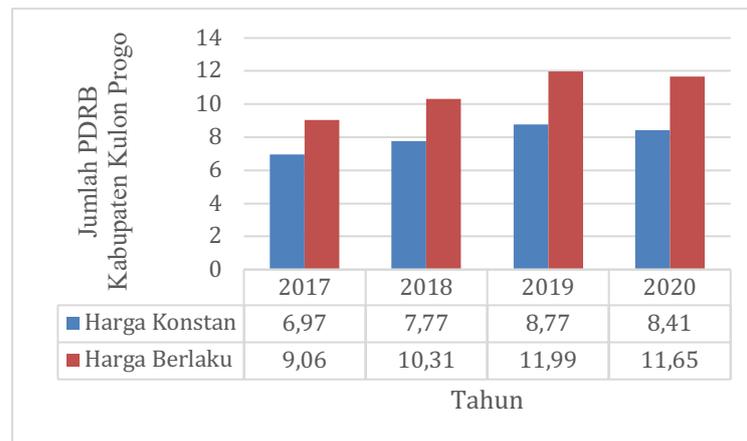
1. Pendahuluan

Pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi kekuatan ekonomi baru pada suatu daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bisnis-bisnis industri kreatif yang bermunculan seiring dengan berkembangnya kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Dalam ruang lingkup ekonomi, kreativitas menunjukkan suatu formulasi ide-ide baru dan menerapkan ide-ide tersebut untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari produk-produk seni dan budaya, kreasi-kreasi yang berfungsi, inovasi ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi (UNCTAD, 2008). Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai suatu konsep yang menyeluruh (holistik) yang berkenaan dengan interaksi yang kompleks antara budaya, ekonomi dan teknologi dalam menghadapi dunia global, yang dikuasai oleh simbol-simbol, teks, inspirasi dan imajinasi (UNCTAD, 2008). Adanya pengembangan ekonomi kreatif ini memberikan beberapa dampak bagi masyarakat, antara lain meningkatkan motivasi masyarakat dalam mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan ekspor. Berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia dilatarbelakangi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya yang beraneka ragam. Beragam budaya yang dimiliki Indonesia ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan menggunakan potensi kearifan lokal. Beberapa daerah yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup tinggi antara lain, Kota Ambon, Kota Kupang, Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Bali dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Subsektor ekonomi kreatif yang mendominasi pangsa pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain, bidang kerajinan, kuliner dan mode atau busana (Humas DIY, 2022).

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi kreatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Kabupaten Kulon Progo dijuluki sebagai Jewel of Java atau Permata dari Pulau Jawa. Branding ini memiliki makna bahwa pemerintah membangun komitmen untuk memajukan ekonomi daerah melalui potensi-potensi yang dimiliki Kulon Progo seperti kekayaan sumber daya alam, seni budaya, pariwisata dan industri kreatif (DPMT, 2022). Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar pada PDRB Kabupaten Kulon Progo saat ini. Kontribusi lapangan usaha industri kreatif terhadap PDRB Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 adalah sebesar 11,2% [1]. Hal ini menunjukkan bahwa industri kreatif berperan besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, seiring dengan potensi pariwisata yang tinggi diperlukan pula sinergi antar *stakeholder* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu daerah dapat dilihat melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 8,41 triliun rupiah. Angka tersebut turun jika dibandingkan capaian tahun 2019 yang sebesar 8,77 triliun rupiah [2]. Pada tahun 2018 mencapai 7,77 triliun PDRB atas harga konstan menurut pengeluaran, dan tahun 2017 mencapai 6,97 triliun PDRB atas harga konstan menurut pengeluaran. Sedangkan untuk PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran, Pada tahun 2017 mencapai 9,06 triliun, tahun 2018 mencapai 10,31 triliun, pada tahun 2019 mencapai 11,99 triliun dan pada tahun 2020 turun sebesar 2,83% yaitu sebesar 11,65 triliun.



Tabel 1 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Kabupaten Kulon Progo menurut pengeluaran (dalam triliun) pada tahun 2017-2020
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2020.

Adanya peningkatan PDRB yang signifikan pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang berada di wilayah Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan YIA memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat [3]. Beberapa pihak yang merasakan dampak positif dari pembangunan YIA antara lain Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan masyarakat di desa-desa terutama wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya kegiatan ekonomi kreatif seperti adanya hotel, restoran, bisnis catering, bisnis oleh-oleh khas Kulon Progo, perumahan, kontrakan dan juga kos-kosan. Sedangkan, penurunan angka PDRB pada tahun 2020 ini diakibatkan oleh merebaknya virus covid-19 yang melanda Indonesia dan juga seluruh penjuru dunia. Diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan Maret hingga Juni 2020 di Indonesia menyebabkan turunnya produktivitas serta aktivitas ekonomi daerah Kabupaten Kulon Progo. Fenomena tersebut memberikan dampak yang cukup berpengaruh pada sektor ekonomi kreatif, khususnya pada bidang kuliner dan fashion. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan ekonomi tersebut.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus menjalankan komitmennya untuk mengembangkan Gerakan Bela-Beli Kulon

Progo. Sejak tahun 2013, Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini lahir untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal daerah. Hasto Wardoyo yang menjabat sebagai Bupati Kulon Progo pada tahun 2011 hingga 2016 merupakan salah satu pencetus gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Diawal kepemimpinannya, ia mewajibkan para pelajar dan PNS untuk mengenakan Batik Geblek Renteng pada hari tertentu. Selanjutnya, ia juga menjamin pendapatan petani lokal, dengan mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulon Progo sejumlah 10 kg/bulan. Selain itu, di wilayah Kulon Progo, Alfamart dan Indomaret tidak diijinkan untuk membuka usahanya, kecuali mau bermitra dengan koperasi. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam MoU. Salah satu syaratnya ialah Alfamart dan Indomaret wajib menampung 20% dari total barang dagangan di ToMiRa untuk produk UMKM lokal dan juga wajib mempekerjakan karyawan yang merupakan warga asli Kulon Progo. Alfamart dan Indomaret yang bekerja sama dengan koperasi, namanya bukan Alfamart dan Indomaret lagi tapi diganti menjadi ToMiRa atau Toko Milik Rakyat [4]. Kebijakan tersebut terus diterapkan hingga saat ini dan mampu menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

Pada penerapannya, Gerakan Bela-Beli Kulon Progo melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini, aktor pemerintah diperankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan aktor swasta diperankan oleh Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo (AirKU), PT. Sumber Alfaria Trijaya dan PT. Indomarco Prismatama. Aktor masyarakat diperankan oleh UMKM, koperasi yang berada di Kabupaten Kulon Progo dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Koperasi yang mengelola ToMiRa dipilih berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo. Beberapa kriteria tersebut adalah koperasi aktif, sehat dan memiliki visi dan misi yang sudah tercapai. Alasan koperasi merupakan salah satu bagian dari aktor masyarakat karena didalam koperasi tersebut terdapat para anggota koperasi yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan sebagian anggotanya merupakan pelaku UMKM Kabupaten Kulon Progo. Ketiga jenis aktor ini memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

Berdasarkan hasil pra observasi, peneliti menemukan permasalahan pada implementasi Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yaitu pada program ToMiRa, terdapat beberapa toko ToMiRa yang tidak menerapkan perjanjian MoU ToMiRa secara berkelanjutan yaitu menempatkan 20% produk UMKM lokal Kulon Progo dari total space yang ada. Hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi bagi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo dan koperasi yang mengelola gerai ToMiRa. Belum adanya teguran dan sanksi yang tegas kepada koperasi yang tidak menerapkan MoU dengan baik menjadi celah bagi koperasi yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari mengelola ToMiRa. Walaupun demikian, terdapat pula koperasi yang telah menerapkan MoU dan menjiwai roh Gerakan Bela-Beli Kulon Progo dengan baik. Salah satu contohnya adalah Koperasi Binaria.

Adanya pandemi covid-19 ini memberikan dampak yang cukup kuat pada sektor UMKM terutama pada bidang kuliner dan industri kreatif. Bahkan hasil survey menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang belum pernah dihadapi perusahaan sebelumnya akibat pandemi covid-19, yaitu dua dari tiga perusahaan yang menghentikan operasinya baik sementara maupun secara permanen, karena pendapatan menurun drastis (Rosita, 2020). Sama halnya dengan UMKM di Kulon Progo yang menemui permasalahan di lingkup internal maupun eksternal. Di lingkup internal UMKM yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi dan minimnya kemampuan UMKM dalam jaringan pemasaran masih menjadi kendala (Jati, 2022). Di masa pandemi ini, banyak UMKM di Kulon Progo yang mengalami penurunan omzet dan terpaksa harus gulung tikar. Menurunnya daya beli masyarakat merupakan salah satu penyebabnya. Akibatnya tingkat permintaan terhadap produk UMKM juga menurun drastis. Tidak hanya itu, terbatasnya modal dan bahan baku juga menjadi permasalahan bagi UMKM terutama yang baru merintis usahanya diawal pandemi covid-19. Di lingkup eksternal terdapat masalah pada distribusi produk yang terhambat karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini tentunya menghambat pengiriman dan atau penerimaan barang kepada konsumen. Oleh karenanya pelaku UMKM harus meningkatkan kreativitas dan strategi agar usahanya mampu bertahan ditengah resesi ekonomi akibat adanya pandemi covid-19 ini.

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor dalam collaborative governance juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Contoh nyata dari partisipasi masyarakat dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini adalah menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM lokal Kulon Progo. Namun, berdasarkan data pra observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat yang belum optimal untuk mendukung Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni mencapai 18,38% pada Maret 2021 (Katadata.co.id, 2022). Hal ini menyebabkan masyarakat Kulon Progo cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Seringkali masyarakat dipaksa tanpa adanya dorongan dari hati nurani untuk ikut berpartisipasi dalam program yang manfaatnya sedikit bagi masyarakat dengan dalih mengatasnamakan partisipasi (Mustanir, 2018).

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Gerakan Bela-Beli Kulon Progo merupakan gerakan yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, namun pemerintah, masyarakat dan juga swasta harus saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan dari kolaborasi yang dilakukan. Sikap yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini merupakan bentuk dari pelayanan publik yang dikolaborasikan dengan peran masing-masing aktor swasta maupun masyarakat sipil. Tujuannya adalah sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal tersebut dapat mendukung adanya penerapan collaborative governance terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo. Prinsip dasar dalam

penerapan *collaborative governance* adalah adanya pelibatan aktor swasta, pemerintah dan masyarakat untuk berorientasi pada konsensus dan melakukan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, serta memiliki tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2008). Dalam *collaborative governance* terdapat beberapa tahapan yang tertuang pada model *collaborative governance*, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Tahapan-tahapan tersebut nantinya akan menjadi tujuan dalam penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. *Collaborative governance* ini diharapkan dapat menjadi suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan bersama sesuai dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahya (2020) yang berjudul *Proses Collaborative Governance dalam Penerapan Uang Elektronik (Unik) Di Jalan Tol Kota Makassar*, menyatakan bahwa *collaborative governance* dapat menjadi wadah positif bagi aktor yang terlibat dalam kolaborasi mengenai persoalan kemacetan kendaraan di gerbang tol dan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi di jalan tol Kota Makassar. Walaupun demikian, terdapat kekeliruan dalam desain kelembagaan yang tidak melibatkan pemerintah kota Makassar atau pemerintah daerah dalam kolaborasi terkait penerapan Uang Elektronik di jalan tol Kota Makassar. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Zuhriyati (2019) yang berjudul *Collaborative Governance dalam Pengembangan Agroindustri Gula Semut (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo, kecamatan kokap, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018)*, menyatakan bahwa *collaborative governance* yang diterapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan sumber daya alam yang ada. Namun dalam pelaksanaannya peran *stakeholder* yang terlibat masih banyak menemui kendala dilapangan. Perbedaan ini disebabkan karena kejelasan desain kelembagaan masing-masing *stakeholder* yang berbeda. Penelitian mengenai *collaborative governance* tentunya sudah cukup banyak jumlahnya, namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik sendiri terkait tema tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan dalam penyebab terjadinya kolaborasi, aktor yang terlibat, tahapan kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat kolaborasi. Kebaruan pengembangan riset dalam penelitian ini adalah terletak pada masalah yang dikaji, yakni terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Kulon Progo yaitu Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ditinjau dari sisi model *collaborative governance*.

Fenomena diatas menarik minat peneliti untuk memberikan gambaran bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Selain itu, pada Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dalam ekonomi kreatif yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis model *collaborative governance* dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat dari *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan mampu memberikan

kontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi publik pada kajian collaborative governance dan pengembangan ekonomi kreatif daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini memberikan dorongan bagi peneliti untuk menghasilkan temuan penting dalam penelitian. Penelitian studi kasus juga dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki kegiatan atau proses kompleks yang tidak mudah dipisahkan dari konteks sosial di mana hal itu terjadi [5]. Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo (studi kasus Gerakan Bela-Beli) dilaksanakan pada Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo, Perumda Air Minum Tirta Binangun, ToMiRa milik Koperasi Binaria, Sinar Abadi Batik. Subyek penelitian ini antara lain, Cicillia Susi Setyo Cahyani, S.T., M.Eng. selaku Kepala bidang perekonomian dan SDA BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, Ridwan Dhaniarsa Rachman, S.E., selaku Kepala Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, Meiritanto, S.E. selaku Kepala Unit AMDK Perumda Air Minum Tirta Binangun, Suyitno selaku salah satu pemilik ToMiRa dan ketua Koperasi Binaria, Agus Fatkhurohman selaku penanggung jawab dan pemilik usaha Sinar Abadi Batik, dan Tri Surahmawati selaku masyarakat konsumen ToMiRa.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari dilakukannya penelitian adalah memperoleh data [6]. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri atau dapat disebut dengan *human instrument*. Peneliti dalam instrument penelitian memiliki fungsi sebagai individu yang menetapkan fokus penelitian, menentukan responden atau narasumber, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan juga menarik kesimpulan [6]. Oleh karenanya, peneliti memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangkaian proses penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yang didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif Miles dan Huberman [6] yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*).

1. Pengumpulan data, pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Data yang diperoleh berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif Gerakan

Bela-Beli Kulon Progo. Pengumpulan data dimulai dari pengamatan peneliti mengenai lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Kemudian, peneliti mengambil data dokumentasi sebagai data pendukung pada *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

2. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera mungkin dilakukan analisis data melalui reduksi data. Langkah yang dilakukan peneliti setelah melakukan pengumpulan data adalah mereduksi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat mengelompokkan temuan-temuan penting dalam penelitian agar mempermudah tahapan penelitian selanjutnya.

3. Penyajian Data, penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data pada penelitian ini dituangkan dalam bentuk teks naratif yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang terjadinya kolaborasi dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo, perkembangan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo, desain kelembagaan dan pengaruh kepemimpinan pada Gerakan Bela-Beli Kulon Progo, serta proses kolaborasi yang mencakup hasil atau luaran dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Setelah melakukan penyajian data, nantinya peneliti akan memperoleh hasil dari *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Data yang telah disajikan dikumpulkan menjadi satu kesatuan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

4. Penarikan kesimpulan, kesimpulan merupakan sebuah keputusan yang didapatkan berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menemukan temuan-temuan baru yang diperoleh dari *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Kemudian temuan-temuan yang didapatkan oleh peneliti melakukan perbandingan dengan data tertentu serta melakukan pengecekan ulang atau proses *member check*. Selanjutnya, temuan tersebut dijelaskan melalui tahapan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kegiatan verifikasi bertujuan untuk memberikan validitas pada temuan dan kesimpulan yang telah diperoleh berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Collaborative Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Studi Kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo

Pengembangan ekonomi kreatif khususnya dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo melibatkan banyak *stakeholder*. Banyaknya *stakeholder* yang terlibat dilatarbelakangi oleh adanya beberapa program yang dijalankan dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Kolaborasi dalam penelitian pada pengembangan ekonomi kreatif khususnya dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini melibatkan 5 organisasi atau lembaga yang terdiri dari BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, Perumda Air Minum Tirta Binangun, Koperasi Binaria, dan Sinar Abadi Batik. Pembahasan hasil penelitian tentang *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo difokuskan pada bidang pengembangan ekonomi kreatif dan dibahas lebih lanjut menggunakan teori Ansell and Gash (2008) yang terdiri dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif.

1. Kondisi Awal

Kondisi awal pada *collaborative governance* merupakan kondisi dimana kolaborasi belum dimulai. Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Kondisi awal dapat menjadi pemicu timbulnya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut terlibat (Ansell & Gash, 2008). Keinginan tersebut muncul akibat adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya, insentif untuk berpartisipasi, dan prasejarah konflik atau kerjasama. Faktor yang mempengaruhi kondisi awal pada kolaborasi ini lah yang nantinya dapat menghambat atau mendorong proses kolaboratif.

Dalam kondisi awal ini, terdapat permasalahan umum yang mendorong terjadinya *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo (studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo) yaitu perbedaan kepemilikan sumber daya dan insentif untuk berpartisipasi. Perbedaan kepemilikan sumber daya dapat dipahami sebagai kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder*. Mengkonseptualisasikan kekuasaan dalam kaitannya dengan sumbernya secara implisit mengasumsikan bahwa kekuasaan adalah sumber daya yang dapat diperluas, dikurangi, atau dialihkan (Purdy, 2012). Kekuasaan atau kekuatan terbesar berada ditangan pemerintah yaitu sebagai *stakeholder* yang membuat kebijakan atau program serta membiayainya. Sedangkan aktor swasta dan masyarakat memiliki kekuatan atau sumber daya untuk memfasilitasi teknologi dan pemasaran baik secara *offline* maupun *online*.

Permasalahan umum selanjutnya yang mendorong terjadinya *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo (studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo) adalah insentif untuk berpartisipasi. Mengingat bahwa partisipasi bersifat sukarela, penting untuk memahami insentif

stakeholder untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Insentif untuk berkolaborasi akan meningkat apabila setiap aktor dapat melihat adanya hubungan langsung atas partisipasi mereka terhadap outcome kebijakan yang terlihat, konkrit serta efektif. Insentif akan menurun apabila partisipasi hanya dianggap sebagai kegiatan yang seremonial atau formalitas. *Collaborative governance* tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi. Terdapat tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain, keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing di pasar (Fendt, 2010). Dalam kondisi awal kolaborasi, para *stakeholder* yang terlibat dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo dapat memprediksi bahwa kolaborasi yang dijalankan akan memberikan dampak yang baik bagi keberlanjutan organisasi, aktor non state seperti Alfamart atau Indomaret dan Perumda Air Minum Tirta Binangun mengerti bahwa dengan adanya gagasan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasinya terutama di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan hal yang krusial dalam sebuah kolaborasi. Desain kelembagaan mengacu pada tata cara dan aturan dasar untuk kolaborasi untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum. Aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur (Ansell & Gash, 2008). Aturan tersebut harus bersifat adil, transparan dan inklusif, sehingga para *stakeholder* yang terlibat dapat yakin bahwa semua diskusi dan negosiasi adalah nyata dan bukan hanya basa-basi atau hanya dijadikan sebagai hiasan saja. Dengan adanya kejelasan aturan dan prosedur, para *stakeholder* dapat menerapkan batas-batas atau kewenangan dan sistem pengaturan hubungan antar lembaga terkait. Hal tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dalam kolaborasi.

Dalam penelitian ini, aturan dan batas-batas tersebut diatur dalam perjanjian kerjasama MoU yang terjadi antara Alfamart atau Indomaret dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Bupati Kulon Progo yaitu Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K)) dan Peraturan Daerah mengenai produk AirKU. Perjanjian kerja sama antara Alfamart atau PT. Sumber Alfaria Trijaya dan Indomaret atau PT. Indomarco Prismatama terdiri dari dua jenis kerja sama, yaitu take over dan modal penyertaan. Sedangkan, untuk kasus AirKU yang merupakan diversifikasi usaha dari Perumda Air Minum Tirta Binangun diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun.

Selain itu, batas-batas juga dapat meliputi peran yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi. Berikut merupakan uraian keterlibatan peran *stakeholder* dalam *collaborative governance* Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

- a. BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, memiliki peran sebagai Pelaksana kebijakan, melakukan pembinaan dan pelatihan pada Koperasi dan UMKM,

- dan memfasilitasi anggaran dan perencanaan program dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo
- b. Dinas Koperasi Kabupaten Kulon Progo memiliki peran sebagai Pelaksana kebijakan, pembinaan dan pelatihan pada koperasi dan UMKM, memfasilitasi permodalan pada koperasi dan UMKM, dan manajerisasi Koperasi dan UMKM
 - c. Perumda Air Minum Tirta Binangun memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan, pengembang bisnis, penyedia fasilitas dan dorongan pada produk Airku, dan penyedia suplai pasokan air bersih dan air minum bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo
 - d. Sinar Abadi Batik memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan, serta membantu dan mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif Gerakan Bela-Beli Kulon Progo
 - e. Koperasi Binaria memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan, membangun iklim usaha produk lokal Kabupaten Kulon Progo, serta membantu dan mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif Gerakan Bela-Beli Kulon Progo
 - f. PT. Sumber Alfaria Trijaya dan PT. Indomarco Prismatama memiliki peran sebagai Pengembang bisnis, pemberi modal, penyedia fasilitas dan teknologi untuk menunjang Gerakan Bela-Beli Kulon Progo
 - g. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo memiliki peran sebagai Pelaksana pengembangan ekonomi kreatif Gerakan Bela-Beli Kulon Progo dan mendukung setiap program menyangkut Gerakan Bela-Beli Kulon Progo

Desain kelembagaan yang inklusif juga memastikan kesempatan bagi setiap *stakeholder* untuk berunding dengan yang lain tentang menetapkan tujuan untuk mencapai hasil kebijakan melalui konsensus. Dalam desain deliberatif seperti itu, ada lebih banyak peluang untuk memasukkan pengetahuan dan keterampilan asli yang meningkatkan pemahaman bersama dari setiap *stakeholder* tentang penggunaan kebaikan bersama. Selain itu, representasi yang tidak inklusif dari satu atau banyak *stakeholder* dapat menyebabkan lingkaran setan dengan meningkatkan ketidakseimbangan kekuatan dan kesenjangan pengetahuan (Aheto et al., 2016). Oleh karena itu, desain kelembagaan yang inklusif harus memenuhi setidaknya dua persyaratan penting, yaitu harus mengizinkan masyarakat setempat untuk memiliki hak milik atas penggunaan sumber daya dan harus memungkinkan masyarakat lokal untuk membangun lembaga tingkat lokal yang mengontrol penggunaan sumber daya, distribusi manfaat dan ganti rugi keluhan yang timbul selama penggunaan sumber daya. Dalam penelitian *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo (studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo), telah terdapat aturan eksplisit yang memandu peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* dengan cara yang inklusif dan tidak mendiskriminasi (atau mengecualikan) satu *stakeholder*, sehingga dapat membuat proses partisipatif pada Gerakan Bela-Beli Kulon Progo lebih baik dan menjadi program yang berkelanjutan dalam hal partisipasi dan hasil. Adanya undang-undang, peraturan dan prosedur yang jelas yang dikembangkan dengan masukan masyarakat setempat dan yang ditinjau dan diperbarui secara berkala, dapat mempengaruhi keberhasilan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Agar kolaborasi berhasil dari awal negosiasi hingga struktur proses hingga pencapaian hasil akhir, harus ada aktor yang memiliki kemampuan kepemimpinan untuk membawa berbagai *stakeholder* ke sebuah *platform* atau wadah, melibatkan mereka dengan semangat kolaboratif, menetapkan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, mengeksplorasi solusi kreatif untuk tujuan bersama, menjaga kredibilitas teknis, memberdayakan *stakeholder* yang lemah, dan memastikan integritas proses kolaboratif. Dalam konteks di mana ketidakseimbangan kekuasaan berada di antara *stakeholder* yang tidak percaya satu sama lain, kepemimpinan menjadi lebih kritis (Ansell & Gash, 2008). Jenis pemimpin fasilitatif dapat bergantung pada konteks distribusi kekuasaan dan insentif untuk berpartisipasi. Pihak ketiga ini diakui dan dipercaya oleh *stakeholder*, dapat memberikan layanan yang netral dan memfasilitasi dalam situasi konflik tinggi dan rendah kepercayaan, di mana kekuasaan seimbang dengan kesediaan *stakeholder* untuk berpartisipasi.

Adanya ketidakseimbangan kekuatan atau insentif untuk berpartisipasi lemah mungkin membutuhkan pemimpin “organik” yang kuat yang mungkin berasal dari komunitas dan dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai *stakeholder* pada awal proses negosiasi. Dengan demikian, ketersediaan pemimpin organik seperti itu mungkin sangat membatasi keefektifan proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). Pemimpin organik disini dapat diartikan sebagai pemimpin yang berasal dari daerah kekuasaannya atau pemimpin asli pribumi yang ingin memperbaiki wilayah yang ia pimpin. Dalam penelitian ini, kepemimpinan fasilitatif telah diwujudkan oleh Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kulon Progo pada 2011 – 2019. Beliau merupakan sosok pemimpin yang mampu membawa nama Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten yang kaya akan pengembangan ekonomi kreatifnya. Hal tersebut dibuktikan dengan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang saat ini telah menginspirasi berbagai daerah untuk bangkit bersama koperasi dan UMKM.

Peran pemimpin atau pejabat pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif khususnya pada Gerakan Bela-Beli Kulon Progo juga penting dalam menunjukkan komitmen yang stabil dan transparan selama proses kolaborasi karena pergantian kepemimpinan pemerintah yang tiba-tiba seringkali menyebabkan kegagalan proyek. Perlu diketahui saat ini, kepemimpinan Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) telah diteruskan oleh wakilnya yaitu Sutedjo. Dalam pergantian kepemimpinan tersebut, Bupati Sutedjo tetap menjalankan amanah dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo melalui gaya kepemimpinannya. Beliau memberikan masukan-masukan mengenai apa saja inovasi yang harus dikembangkan terutama dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Komitmen yang dijalankan oleh para pejabat pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini menjadi harapan bagi tercapainya tujuan kolaborasi Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yaitu penguatan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo. Tidak hanya itu, kepemimpinan fasilitatif juga telah diterapkan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, Direktur Perumda Air Minum Tirta Binangun, Ketua Koperasi Binaria dan Pemilik Sinar Abadi Batik. Masing-masing pimpinan *stakeholder* berupaya untuk membangun

kepercayaan dan memberikan instruksi yang konsisten dan juga jelas. Selain itu, komitmen untuk akuntabilitas juga dapat dilihat dalam komitmen para pemimpin *stakeholder* untuk membuat kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo bersifat berkelanjutan.

4. Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif umumnya terbagi menjadi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Berbagai tahapan tersebut membentuk sebuah lingkaran yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Semua jenis tata kelola kolaboratif memerlukan dialog tatap muka di antara para *stakeholder*. Dialog tatap muka tidak selalu tertuju pada kolaborasi, namun kegiatan tersebut dapat memperkuat stereotip atau meningkatkan antagonisme (Ansell & Gash, 2008). Dalam dialog tatap muka umumnya terdapat komunikasi yang dilakukan antara masyarakat, pemerintah dan juga swasta dalam lingkup perannya masing-masing. Partisipasi masyarakat meningkat seiring dengan dilibatkannya peran masyarakat dalam berbagai pengambilan keputusan dalam suatu dialog tatap muka atau diskusi diselenggarakan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat membangun kepercayaan diri dan keterampilan dalam proses negosiasi. Namun, hal tersebut kembali lagi pada keberhasilan diskusi sekali dan bergantung pada kepemimpinan yang ada serta komitmen terhadap proses yang sama pentingnya dengan proses kolaboratif. Dialog tatap muka yang terjadi dalam penelitian ini, terbentuk dalam rapat, bimbingan teknis maupun diskusi kunjungan secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan dan mengevaluasi implementasi Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

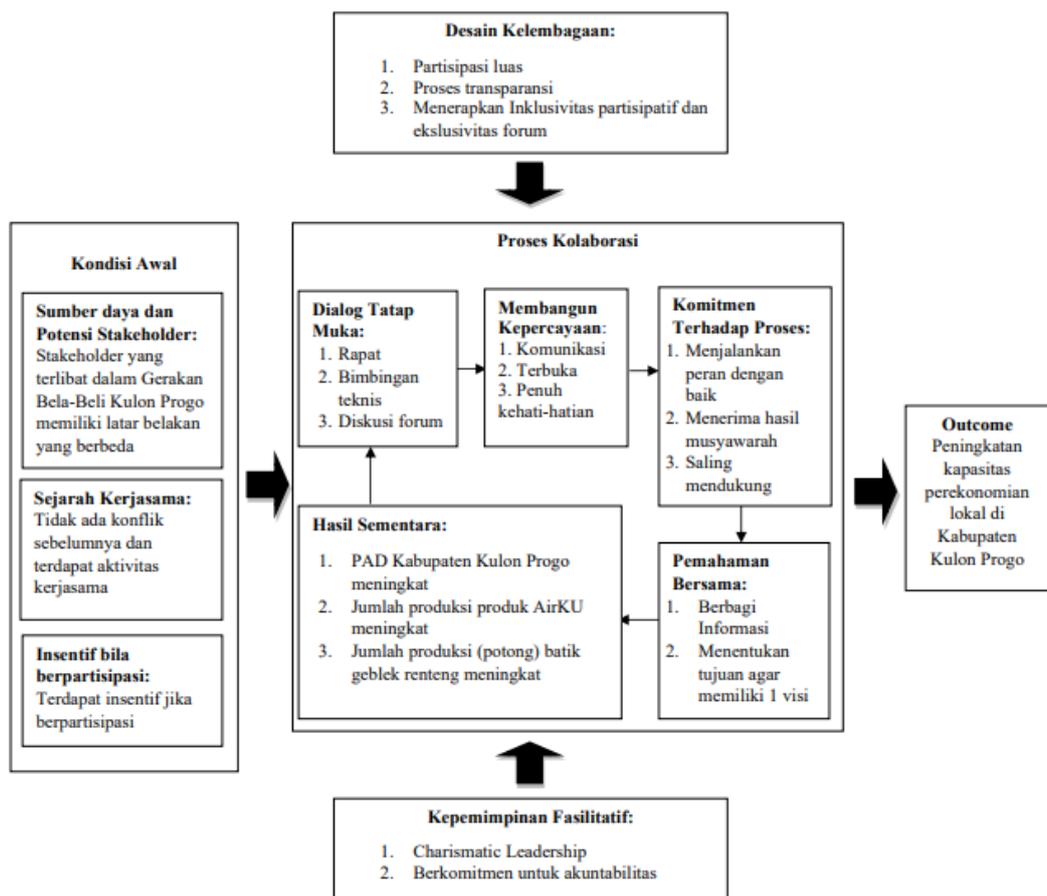
Membangun kepercayaan dan komitmen bersama merupakan dua hal yang saling berhubungan. Komitmen tergantung pada kepercayaan yang ada di antara para *stakeholder* dan transparansi dalam prosedur yang membangun integritas untuk negosiasi. Inisiatif untuk mencari peningkatan keterlibatan masyarakat dapat menciptakan rasa komitmen dan kepemilikan di antara masyarakat yang pada akhirnya dapat mengatasi ketidakseimbangan kekuatan atau perbedaan persepsi. Kurangnya insentif untuk berpartisipasi dapat diterjemahkan sebagai kurangnya komitmen nyata dari para *stakeholder* (Ansell & Gash, 2008). Dalam penelitian ini, pelaksanaan komitmen yang kuat pada pengembangan ekonomi kreatif khususnya Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ada pada rencana atau strategi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam RPJMD tahun 2011-2016 dan RPJMD tahun 2017-2022. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal, menjadi kekuatan landasan dan kekuatan hukum bagi pemerintah, masyarakat dan swasta untuk meningkatkan komitmen di dalam roh Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

Pemahaman bersama tentang pencapaian kolektif terbentuk di beberapa titik selama kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). *Stakeholder* yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (*stakeholder*) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Seringkali, masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hasil kolaborasi. Hal tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah

dengan cara melakukan komunikasi yang efektif diantara para *stakeholder* untuk membantu pemahaman bersama. Lembaga Pemerintah Daerah seperti Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo dan BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo dapat menjadi wadah bagi aktor swasta maupun masyarakat untuk saling mengemukakan keluh dan kesah yang dialami dalam kolaborasi dari awal hingga saat ini.

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata dari proses kolaborasi yang telah dilakukan. Kemenangan kecil dari kolaborasi tidak hanya mewakili hasil yang nyata, tetapi juga hasil proses kritis yang dapat memberi umpan balik ke dalam lingkaran kolaboratif yang baik dalam membangun kepercayaan dan komitmen (Ansell & Gash, 2008). Hasil sementara dalam penelitian ini mencakup peningkatan jumlah produksi, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo dan banyaknya penghargaan yang diraih Kabupaten Kulon Progo. Kesenambungan dalam kemenangan kecil ini sangat penting untuk kemampuan keberlanjutan jangka panjang dari pengembangan ekonomi kreatif khususnya dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

Berdasarkan beberapa data yang terlampir sebelumnya dan merujuk pada model *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), alur *collaborative governance* pada Gerakan Bela-Beli Kulon Progo adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Hasil *collaborative governance* gerakan bela-beli kulon progo

Sumber: Peneliti, 2023

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Studi Kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo

Faktor pendukung dilaksanakannya kolaborasi antara lain:

1. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Tingginya tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo ini kemudian memotivasi Bupati Kabupaten Kulon Progo saat itu yaitu Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo, SP.OG. (K) untuk membuat Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Angka kemiskinan yang cukup tinggi.
2. Struktur sosial masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Struktur sosial didasarkan pada hubungan antar *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi. Struktur sosial ini sendiri berkaitan dengan struktur perencanaan, struktur tugas dan fungsi *stakeholder* dan dengan demikian menjelaskan hubungan kolaborasi. Setiap *stakeholder* telah mengetahui akan tugas dan fungsinya dalam proses kolaborasi pengembangan ekonomi kreatif Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Maka dengan begitu para *stakeholder* akan menumbuhkan sikap kesadaran terhadap tugasnya masing-masing. Membangun kesadaran *stakeholder* akan tugasnya meningkatkan kinerja dalam proses kolaborasi, tidak hanya dalam penyelesaian tugas, tetapi juga memperhatikan hasil maksimal dalam hal pekerjaannya.
3. Tingkat kesadaran masyarakat. Masyarakat telah memiliki kesadaran dan mendukung adanya Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap masyarakat yang aktif membeli produk-produk lokal Kulon Progo, seperti memakai batik geblek renteng, menggunakan produk AirKU dan membeli produk lokal di ToMiRa.
4. Kepentingan pemerintah. Faktor kepentingan pemerintah berkaitan erat dengan kepentingan politik antar *stakeholder* yang berkolaborasi. Aktor pemerintah disini diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo. Salah satu bentuk kepentingan pemerintah adalah dengan adanya pembuatan kebijakan. Bentuk dari kepentingan pemerintah ini diwujudkan dalam kebijakan mengenai pengembangan ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif yang kemudian pada level kebijakan ekonomi kreatif daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017. Perda tersebut mengatur perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan koperasi, UMKM, dan industri kreatif. Peraturan daerah ini juga diperkuat dengan dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Dalam RPJMD tersebut dijelaskan lebih detail dalam

arah kebijakan untuk menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan, yaitu peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan semangat Bela Beli Kulon Progo. Kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif sudah seharusnya menjadi faktor pendukung. Dengan adanya kebijakan tersebut mampu mengatur dan mengarahkan suatu program berjalan baik. Adanya kebijakan tersebut diharapkan semakin menumbuhkan sikap cinta akan produk sendiri atau produk lokal dan meningkatkan kualitas serta kuantitas KUMKM khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

5. Faktor pendukung lainnya adalah bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, pemasaran bermitra dengan pengusaha besar, pelayanan perizinan satu atap di DPMPT, penguatan modal melalui kemitraan dengan perbankan melalui KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), fasilitasi perizinan HKI, kurasi produk UMKM, Kerjasama Dinas koperasi UKM dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco dan PT Angkasa Pura I dalam melakukan pemasaran produk, fasilitasi pelatihan, bantuan peralatan, adanya kebijakan Takeover oleh koperasi kepada toko modern (ToMiRa). Hal tersebut dapat menjadi komponen yang mendukung terciptanya kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif studi kasus gerakan bela-beli kulon progo di kabupaten kulon progo, antara lain:

1. Faktor kemasan produk lokal yang kurang mendukung dan pemasaran produk bela-beli melalui website belabeli.com yang belum berjalan dengan optimal. Seperti yang kita ketahui saat ini kita telah memasuki era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan luar biasa di bidang teknologi internet. Namun, seringkali UMKM awam akan pentingnya kemasan dan juga teknik pemasaran. Masih banyak UMKM yang menggunakan jenis kemasan yang kurang menarik dan hanya mengandalkan pemasaran secara offline. Pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan agar UMKM lebih terbuka akan perkembangan teknologi yang ada.
2. Kurangnya komitmen para pelaku UMKM dan koperasi juga menjadi faktor penghambat dalam proses kolaborasi. Beberapa pelaku UMKM sering berganti jenis usaha sehingga membuat terjadinya ketidakkonsistenan pada perkembangan UMKM. Pelaku UMKM berganti-ganti jenis usaha ini mengharuskan UMKM tersebut untuk memulai usaha dari awal. Hal tersebut seharusnya dapat dicegah dengan melakukan pembaharuan teknologi maupun dengan mengajukan modal ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo. Adapun kurangnya komitmen koperasi terdapat pada banyaknya koperasi yang pasif dalam kolaborasi produk UMKM dalam ToMiRa. Dalam hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa ToMiRa yang tidak menyediakan display produk UMKM lokal atau sebanyak 20% dari keseluruhan display atau rak yang tersedia.
3. Kondisi mentalitas masyarakat di Kabupaten Kulon Progo merupakan hal perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses kolaborasi. Mengingat masih

banyaknya masyarakat yang lebih percaya kepada produk yang telah lebih dahulu memiliki nama atau *brand*. Akibatnya produk lokal menjadi kurang berkembang di kalangan masyarakat. Di sisi lain, sebagian masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam mendukung kolaborasi pengembangan ekonomi kreatif Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Seperti contoh, masih banyak dinas daerah yang belum menggunakan galon merk AirKu. Melihat adanya permasalahan tersebut maka dapat menghambat proses tata kelola kolaborasi.

4. Kesimpulan

Collaborative governance menjadi wadah bagi para aktor yang terlibat untuk berproses positif dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 melalui kolaborasi peran antar aktor yang terlibat, yaitu BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, Perumda Air Minum Tirta Binangun, Koperasi Binaria, Sinar Abadi Batik dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan pada capaian kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang telah berjalan dengan optimal. Namun demikian terdapat dinamika kerentanan masalah yang berupa peran yang belum maksimal dari beberapa koperasi dalam penerapan kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo di Program Toko Milik Rakyat (ToMiRa). Selain itu, Banyak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang belum konsisten dan komitmen dalam menjalankan usahanya menjadi masalah dalam desain kelembagaan. Dampak *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo adalah secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kulon Progo, meningkatkan partisipasi peran koperasi dalam pelaksanaan *collaborative governance*, membuka peluang usaha dan jejaring bagi UMKM dan Perumda Air Minum Tirta Binangun, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi produk ekonomi kreatif, serta memberikan stimulus pengembangan diversifikasi produk ekonomi kreatif.

Faktor pendukung pada *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo (studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo) adalah faktor sosial dan faktor kepentingan pemerintah. Beragam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga dapat menjadi faktor pendukung pelaksanaan proses kolaborasi. Selain itu faktor pendukung juga diperoleh dari faktor bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, pemasaran bermitra dengan pengusaha besar, pelayanan perizinan satu atap di DPMPT, penguatan modal melalui kemitraan dengan perbankan melalui KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), fasilitasi perizinan HKI, kurasi produk UMKM, Kerjasama Dinas koperasi UKM dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco dan PT Angkasa Pura I dalam melakukan pemasaran produk, fasilitasi pelatihan, bantuan peralatan, adanya kebijakan Takeover oleh Koperasi kepada toko modern (ToMiRa). Sedangkan, faktor penghambat pada *collaborative*

governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo (studi kasus Gerakan Bela-Beli Kulon Progo) adalah kemasan produk lokal yang kurang mendukung, pemasaran produk bela-beli melalui *website* belabeli.com yang belum berjalan dengan baik, rendahnya komitmen para pelaku UMKM dan Koperasi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan SKPD untuk menggunakan produk Bela-Beli Kulon Progo, dan juga kondisi mentalitas masyarakat.

Referensi

- [1] BPS Kabupaten Kulon Progo, Statistik Daerah Kabupaten Kulon Progo 2021, Kabupaten Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2021
- [2] BPS Kabupaten Kulon Progo, "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha 2016-2020," Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, 2021
- [3] H. Susanto, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo," *Majalah Ilmiah Bijak*, 2020.
- [4] Kemenparekraf, "Teladan Dalam Senyap: Belajar Nasionalisme Ekonomi Dan Bela Pribumi Dari Kulon Progo," 26 September 2020. [Online]. Available: <https://kotakreatif.kemenparekraf.go.id/teladan-dalam-senyap-belajar-nasionalisme-ekonomi-dan-bela-pribumi-dari-kulon-progo/>.
- [5] U. Prihatsanti, S. and W. Hendrian, "Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi," *Buletin Psikologi*, 2018
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- [7] Humas DIY, "Tingginya Potensi Ekonomi Kreatif di DIY," 29 January 2022. [Online]. Available: <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/9843-tingginya-potensi-ekonomi-kreatif-di-diy>.
- [8] DPMT, "Potensi Investasi," 11 February 2022. [Online]. Available: <https://dpmt.kulonprogokab.go.id/detil/563/potensi-investasi#:~:text=Kabupaten%20Kulon%20Progo%20memiliki%20keunggulan,lainnya%20di%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta.&text=Berbagai%20fasilitas%20pendukung%20seperti%20Pelabuhan,dibangung%20di%20Kabupaten%2>
- [9] R. Rosita, "Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM," *Jurnal Lentera Bisnis*, 2020.
- [10] B. Jati, "Bisnis UMKM Lesu, Kurangnya SDM Mumpuni Jadi Kendala," 25 February 2022. [Online]. Available: <https://kulonprogo.sorot.co/berita-7747-bisnis-umkm-lesu-kurangnya-sdm-mumpuni-jadi-kendala.html>.
- [11] Katadata.co.id, "Kabupaten Ini Miliki Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Yogyakarta," 10 January 2022. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kabupaten-ini-miliki-tingkat-kemiskinan-tertinggi-di-yogyakarta>.
- [12] A. Mustanir, "Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 2018.
- [13] C. Ansell and A. Gash, "Collaborative in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2008
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013, p. 374.